



POLICY PAPER : Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Purwakarta

Endra Prasetyo, ST.,MT.

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta

Purwakarta – Januari 2024

Ringkasan Kebijakan

Dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor industri pengolahan, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta dipengaruhi oleh faktor pencetus yaitu besarnya nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan faktor perantara yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, dimana nilai investasi PMA dan PMDN mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi yang akan mempengaruhi besarnya pendapatan per kapita masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat, angka kemiskinan akan semakin berkurang.

Saran Kebijakan

Penyusunan kebijakan strategis untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Purwakarta dapat mengikutsertakan analisis hubungan antara kemiskinan dengan struktur ekonomi, terutama pada besarnya peran skala perekonomian pada sektor atau sektor-sektor penggerak perekonomian utama yang mempengaruhi besarnya nilai pendapatan per kapita masyarakat. Secara prediktif, dapat dihitung bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6.00% per tahun akan dapat menurunkan Jumlah Penduduk Miskin dari 83.440 jiwa (persentase Jumlah Penduduk Miskin = 8.70%) di tahun 2022 menjadi 74.022 jiwa (persentase Jumlah Penduduk Miskin = 7.09%) di tahun 2023.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Gandanegara No. 25 Telepon/Fax (0264) 8307463
Website : www.bappelitbangda.purwakarta.go.id e-mail : bappedakabpurwakarta@gmail.com
Purwakarta - 41111

SURAT PERINTAH

Nomor : KPG.11.01/046/Litb-Bappelitbangda/2024

Dasar : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : Endra Prasetyo, ST., MT.
NIP : 19750130 200604 1 006
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/ IV.a
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Unit Kerja : Bappelitbangda Kab. Purwakarta

Untuk : Menyusun *Policy Paper* (Makalah Kebijakan)/ *Policy Brief* (Ringkasan Kebijakan) tentang aspek-aspek umum dan / strategis terkait pelaksanaan dan perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Purwakarta.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 17 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



DAERAH Otorita Kabupaten Purwakarta
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
H. NARA KHALID, S.Sos.
PADA TGL. 17/1/24

I. Latar Belakang Masalah

I.1. Tinjauan Referensi : Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan

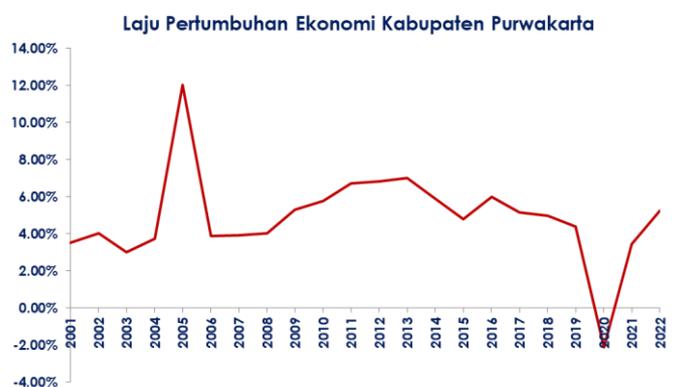
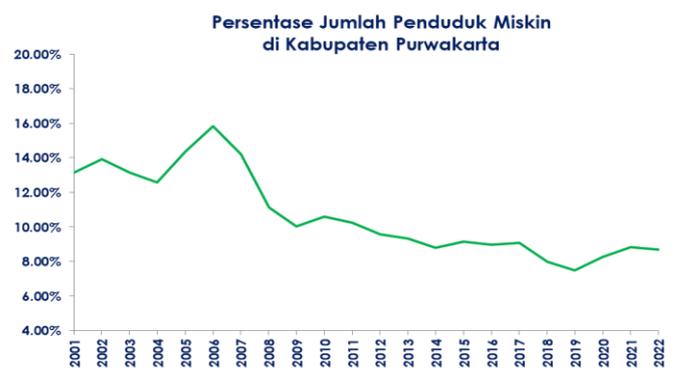
Dalam tinjauan perekonomian makro, kemiskinan merupakan salah satu faktor penting karena dipengaruhi oleh kondisi perekonomian wilayah dan memiliki efek lanjutan terhadap perikehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Sebagian besar studi tentang perekonomian yang dikaitkan dengan tingkat kemiskinan berfokus di sekitar hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan skala ekonomi atau produk domestik bruto, atau laju pertumbuhan ekonomi, dan efek lanjutannya, terutama ketersediaan lapangan kerja/tingkat pengangguran. Seluruh referensi studi di dalam tulisan ini berada pada level strategis dan lebih bersifat tinjauan statistik-matematis karena ditulis oleh para akademisi/analisis. Paper ini mencoba menunjukkan secara prediktif bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta mempengaruhi besarnya angka kemiskinan berdasarkan hasil pengolahan data statistik.

Menurut Kawkani, Neri and Son (2010) dalam Purnomo dan Istiqomah (2019), tujuan pembangunan adalah mengurangi angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, dengan cara menitikberatkan tujuan pertumbuhan ekonomi pada pengurangan angka kemiskinan, sebagaimana diuraikan oleh Siregar dan Wahyuni (2007) dalam Purnomo dan Istiqomah (2019), dan diiringi dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mendukung pengurangan angka kemiskinan (Dollar and Kraay, 2001 dalam Purnomo dan Istiqomah, 2019). Artinya, diperlukan adanya analisis dan strategi pertumbuhan ekonomi diikuti oleh kebijakan-kebijakan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan. Hasil penelitian dari Purnomo dan Istiqomah (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak secara tidak langsung pada pengurangan angka kemiskinan karena memiliki faktor perantara yaitu tingkat kesempatan kerja, yang berarti pertumbuhan ekonomi harus dapat memberi efek peningkatan penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan. Hasil penelitian Wahyudianto (2021) terhadap data pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki efek mengurangi pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada kemiskinan di Kalimantan Barat kurun waktu tahun 2010-2020. Nandori (2010) menunjukkan bahwa selama tahun 1990-2010 berdasarkan 39 data observasi dari 9 negara di Eropa Timur (Kroasia, Republik Czech, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Rusia dan Republik Slovakia) pertumbuhan ekonomi memiliki efek menurunkan kemiskinan, dimana peningkatan GDP (Gross Domestic Product = Produk Domestik Bruto) Per Kapita sebesar 1% akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar

2% dan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 2.14%. Suryahadi et al (2006) menyimpulkan bahwa pengurangan angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi bergantung secara sektoral pada kekuatan wilayah perekonomian, yaitu bertumpu pada satu atau beberapa sektor yang berperan dominan dalam struktur perekonomian di suatu wilayah tertentu. Menggunakan data Susenas berupa data konsumsi 229 jenis bahan makanan dan 110 jenis bahan non-makanan dari 65.000 rumah tangga pada tahun 1984-2002 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 1% di wilayah pedesaan akan mengurangi angka kemiskinan masing-masing sebesar 0.04% di wilayah tersebut, 0.07% di wilayah pertanian desa, 0.08% di wilayah industri pedesaan, 0.11% di wilayah pertanian perkotaan dan 0.07% di wilayah industri perkotaan, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% di wilayah perkotaan akan mengurangi angka kemiskinan masing-masing sebesar 0.14% di wilayah pertanian pedesaan, 0.15% di wilayah industri pedesaan, 0.09% di wilayah pedesaan, 0.09% di wilayah industri perkotaan dan 0.11% di wilayah perkotaan secara keseluruhan, dengan hasil akhir adalah 1% pertumbuhan di sektor pertanian desa akan mengurangi angka kemiskinan sebesar 0.09% di wilayah tersebut dan pertumbuhan perekonomian di industri pedesaan tidak memiliki efek signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan.

1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Angka Kemiskinan di Kabupaten Purwakarta

Data pada Buku Kabupaten Purwakarta Dalam angka (PDA) tahun 2002 – 2023 menunjukkan pada kurun waktu 2001-2022 (atau selama 23 tahun) persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta bervariasi dari tahun ke tahun, dengan tren adanya penurunan sampai akhir tahun 2022. Bila dibandingkan dengan grafik LPE di kurun waktu yang sama, secara visual kedua grafik ini hampir serupa dari tahun 2001-2019, kecuali pada tahun 2020 karena nilai LPE Kabupaten Purwakarta turun

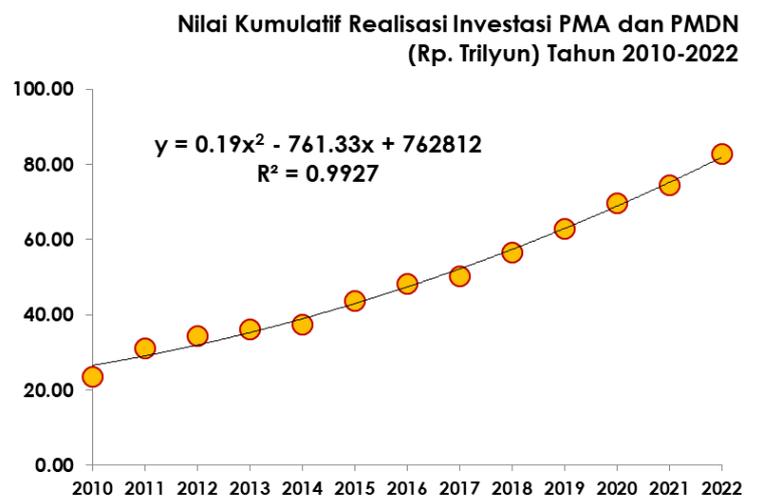


hingga mencapai angka -2.13% per tahun pada tahun tersebut, sebagai efek pandemi COVID-19 yang mulai terjadi secara global dan memuncak pada tahun 2020.

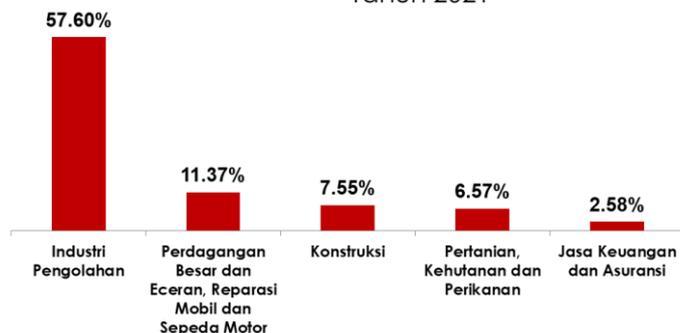
I.3. Profil Perekonomian Kabupaten Purwakarta : Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN, Skala Ekonomi dan Struktur Perekonomian

Sejak tahun 2010, analisis regresi linier terhadap data kumulatif nilai realisasi investasi (nilai kumulatif investasi) penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) menunjukkan bahwa selama kurun waktu 13 tahun terakhir terjadi paling tidak pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN total sebesar Rp. 4.62 trilyun per tahun di Kabupaten Purwakarta. Secara struktur ekonomi, sektor Industri Pengolahan selalu menempati posisi ke-1 dalam dominasi perekonomian dengan porsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berkisar $\pm 57-58\%$ per tahun. Kedua data ini menunjukkan bahwa sektor Industri Pengolahan memiliki porsi dominan dalam pencapaian pertumbuhan PDRB kabupaten total, sehingga pertumbuhan investasi PMA dan PMDN di sektor Industri Pengolahan juga memiliki porsi dominan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Purwakarta. Tercatat bahkan selama masa pandemi COVID-19 kurun waktu akhir Desember 2019 hingga sekitar tahun 2020/2021, sektor Industri Pengolahan selalu mendominasi perekonomian, walaupun laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan hingga

mencapai angka pertumbuhan - 2.13% per tahun pada tahun 2020. Hingga tahun 2022, dominasi 5 sektor perekonomian di Kabupaten Purwakarta masih relatif sama, hanya terdapat perubahan pasca pandemi COVID-19, dimana sektor dominasi ke-5 yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan digantikan oleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Hasil analisis berdasarkan grafik-grafik time series di atas menunjukkan kesesuaian visual dan indikasi hubungan antara grafik peningkatan nilai realisasi investasi dengan tren menurun pada grafik jumlah penduduk miskin.



Struktur Perekonomian Kabupaten Purwakarta Aftermath Pandemi COVID-19 Tahun 2021



Struktur Perekonomian Kabupaten Purwakarta Masa Puncak Pandemi COVID-19 Tahun 2020

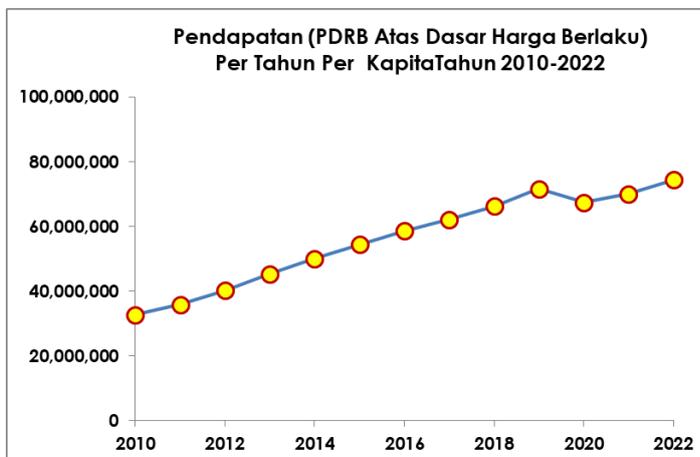


Struktur Ekonomi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2020 - 2021 - 2022

No.	Sektor	Realisasi PDRB ADHB Per Tahun							
		2019 (Rp. Milyar)	Porsi 2019	2020 (Rp. Milyar)	Porsi 2020	2021 (Rp. Milyar)	Porsi 2021	2022 (Rp. Milyar)	Porsi 2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,582.19	6.77%	4,650.21	6.94%	4,650.04	6.57%	5,006.21	6.55%
2	Pertambangan dan Penggalian	43.44	0.06%	43.07	0.06%	47.94	0.07%	49.20	0.06%
3	Industri Pengolahan	38,714.75	57.18%	38,224.62	57.01%	40,775.85	57.60%	44,561.10	58.27%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	450.52	0.67%	441.74	0.66%	502.83	0.71%	520.90	0.68%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.73	0.03%	24.63	0.04%	27.16	0.04%	28.08	0.04%
6	Konstruksi	5,166.05	7.63%	4,926.75	7.35%	5,342.72	7.55%	5,640.50	7.38%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,122.54	12.00%	7,828.29	11.68%	8,051.89	11.37%	8,492.28	11.11%
8	Transportasi dan Pergudangan	1,687.67	2.49%	1,669.51	2.49%	1,720.98	2.43%	1,892.07	2.47%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan - Minum	762.19	1.13%	745.10	1.11%	778.21	1.10%	855.08	1.12%
10	Informasi dan Komunikasi	968.79	1.43%	1,241.29	1.85%	1,293.62	1.83%	1,314.43	1.72%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,675.07	2.47%	1,680.88	2.51%	1,824.62	2.58%	1,982.94	2.59%
12	Real Estate	867.31	1.28%	875.85	1.31%	961.50	1.36%	1,024.64	1.34%
13	Jasa Perusahaan	327.99	0.48%	316.27	0.47%	343.89	0.49%	380.77	0.50%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	903.63	1.33%	868.07	1.29%	856.85	1.21%	841.98	1.10%
15	Jasa Pendidikan	1,521.95	2.25%	1,651.87	2.46%	1,715.10	2.42%	1,782.21	2.33%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	333.17	0.49%	337.35	0.50%	363.37	0.51%	386.03	0.50%
17	Jasa Lainnya	1,560.51	2.30%	1,526.09	2.28%	1,530.92	2.16%	1,710.50	2.24%
	Jumlah :	67,709.51	100.00%	67,051.58	100.00%	70,787.50	100.00%	76,468.92	100.00%

I.4. Profil Perekonomian Kabupaten Purwakarta : Pendapatan Penduduk Per Kapita

Sejak tahun 2010, PDRB Per Kapita Per Tahun di Kabupaten Purwakarta terus mengalami peningkatan dan hanya menurun pada saat puncak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 karena menurunnya LPE pada tahun tersebut. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, secara regresi linier, terjadi peningkatan pendapatan per kapita



per tahun di Kabupaten Purwakarta hingga mencapai nilai sekitar Rp. 3.567.000,- per tahun sampai dengan tahun 2019. Kemudian, dari saat mulainya puncak pandemi COVID-19 hingga tahun 2022 pendapatan per kapita per tahun di Kabupaten Purwakarta mencapai sekitar Rp. 3.498.000,- per tahun, sehingga terdapat penurunan pendapatan per kapita paling tidak sekitar $\pm 19,34\%$. Tren yang meningkat sejak tahun 2010 yang kurang lebih seiring dengan tren turunnya persentase penduduk miskin pada kurun waktu yang sama menunjukkan indikasi adanya pengaruh pendapatan per kapita penduduk terhadap angka kemiskinan, sekaligus tren peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebagai komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta.

I.5. Resume Data Perekonomian Makro, Nilai Investasi dan Angka Kemiskinan

Seluruh data yang digunakan dalam paper ini berasal dari Buku Kabupaten Purwakarta Dalam Angka (PDA) tahun 2002 – 2023. Terdapat 3 data dengan rentang waktu tahun 2002-2022 yaitu data Jumlah/Persentase Penduduk Miskin dan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan sisanya memiliki rentang waktu tahun 2010-2022, kecuali data Nilai Realisasi Investasi PMDN yang berada pada kurun waktu tahun 2007-2022. Nilai LPE dihitung dengan membandingkan antara peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada suatu tahun dengan nilai PDRB ADHK pada tahun sebelumnya. Karena data PDRB ADHK dan PDRB ADHB dihitung per 10 tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (kecuali pada tahun-tahun setelah 2020), maka data yang berlaku dan bisa dianalisis dalam paper ini adalah data PDRB ADHK dan PDRB ADHB tahun 2010 dan seterusnya. Nilai-nilai LPE sebelum tahun 2010 telah dihitung sebelumnya berdasarkan data PDRB ADHK dan PDRB ADHB pada tahun-tahun tersebut.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	PDRB ADHK (Rp. Milyar)	PDRB ADHB (Rp. Milyar)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Per Tahun)	Kumulatif Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp. Trilyun)	Kumulatif Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Trilyun)	Kumulatif Nilai Realisasi Investasi Total PMA dan PMDN
2001	93,791	13.14%			3.50%				
2002	101,400	13.92%			4.00%				
2003	97,640	13.13%			3.01%				
2004	95,500	12.59%			3.72%				
2005	111,100	14.36%			12.01%				
2006	125,000	15.83%			3.87%				
2007	114,500	14.20%			3.90%			1.06	
2008	92,500	11.13%			4.00%			1.06	
2009	84,700	10.02%			5.28%			1.79	
2010	90,300	10.59%	28,016.62	28,016.59	5.77%	32,608,326	22.13	1.46	23.59
2011	89,000	10.26%	29,892.99	31,209.02	6.70%	35,765,587	29.17	1.81	30.98
2012	84,600	9.58%	31,934.35	35,592.43	6.83%	40,199,870	32.07	2.20	34.27
2013	83,600	9.31%	34,166.41	40,618.15	6.99%	45,221,728	33.64	2.36	36.00
2014	80,310	8.80%	36,177.32	45,496.60	5.89%	49,995,859	34.71	2.61	37.32
2015	83,940	9.14%	37,902.43	50,116.71	4.77%	54,380,225	40.68	3.06	43.75
2016	83,550	8.98%	40,169.89	54,575.71	5.98%	58,513,615	44.55	3.68	48.23
2017	85,250	9.06%	42,239.29	58,556.95	5.15%	62,074,260	45.71	4.50	50.21
2018	75,940	7.99%	44,341.67	63,116.67	4.98%	66,200,698	51.71	4.85	56.56
2019	71,860	7.48%	46,278.22	67,709.51	4.37%	71,579,980	56.95	5.84	62.79
2020	80,170	8.27%	45,293.24	67,051.58	-2.13%	67,349,000	60.64	9.13	69.77
2021	84,270	8.83%	46,840.15	70,787.50	3.42%	69,976,000	62.84	11.66	74.50
2022	83,440	8.70%	49,292.97	76,468.92	5.24%	74,345,000	68.54	14.29	82.83

II. Lingkup dan Ragam Masalah

Sebagaimana telah diuraikan di atas, visualisasi data berupa grafik time series menunjukkan adanya indikasi keterkaitan antara nilai realisasi investasi PMA dan PMDN, pertumbuhan ekonomi dan besarnya jumlah/persentase penduduk miskin (angka kemiskinan) di Kabupaten Purwakarta. Visualisasi data sebagaimana disebutkan di atas belum cukup untuk mewakili alih-alih merepresentasikan skenario keterkaitan ketiga hal tersebut di atas, dengan kata lain diperlukan suatu metode untuk menganalisis ada/tidaknya keterkaitan tersebut sekaligus untuk mengetahui pola keterkaitan yang ada dan seberapa besar pengaruh nilai realisasi investasi PMA dan PMDN dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah/persentase penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta.

III. Pernyataan Masalah

Dengan demikian, diperlukan adanya model analisis dan perhitungan untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar pengaruh nilai realisasi investasi PMA dan PMDN dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah/persentase penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta, serta untuk dapat mengetahui bagaimana implikasinya terhadap nilai investasi, pertumbuhan ekonomi dan jumlah/persentase penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta.

IV. Analisis Kebijakan

Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara nilai realisasi investasi PMA dan PMDN, pertumbuhan ekonomi dan jumlah/persentase penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta adalah dengan mencari hubungan regresi per satu hubungan antara keempat hal tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Penyusunan model dilakukan dengan cara coba-banding sedemikian rupa sehingga ditemukan urutan hubungan dan implikasi antara ketiganya. Dengan mengambil nilai korelasi regresi R yaitu $\sqrt{R^2}$ dari nilai determinasi regresi hasil plotting dan dengan anggapan bahwa baik variabel dependen dan variabel independen seluruh data yang di-plot mengikuti sebaran Distribusi Normal (Schober and Boer, 2018), maka kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen adalah sebagai berikut ini.

Koefisien Korelasi	Interpretasi Kekuatan Hubungan antara Variabel Dependen dan Variabel Independen
0% – 10%	Tidak ada hubungan
10% – 39%	Lemah
40% – 69%	Moderat / Menengah
70% – 89%	Kuat

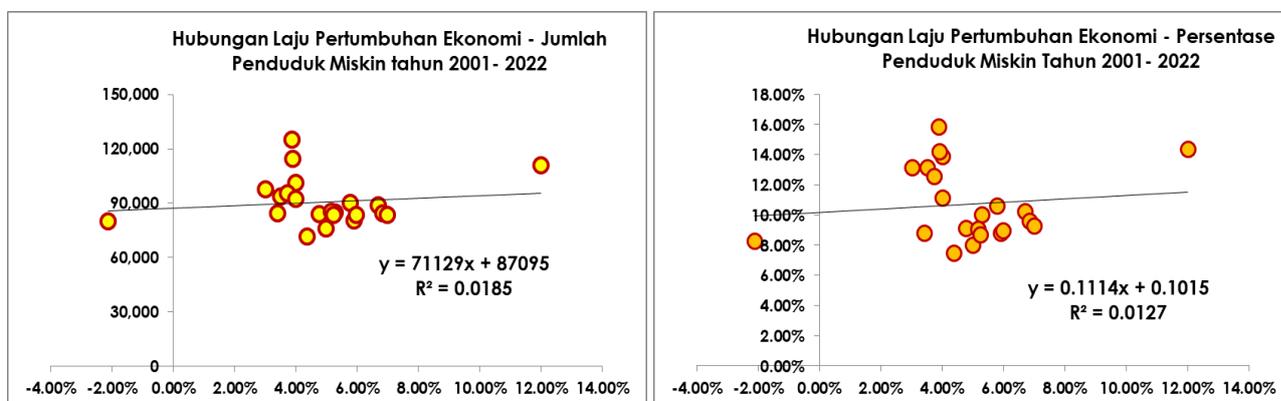
90% – 100%

Sangat Kuat

IV.1. Model Regresi

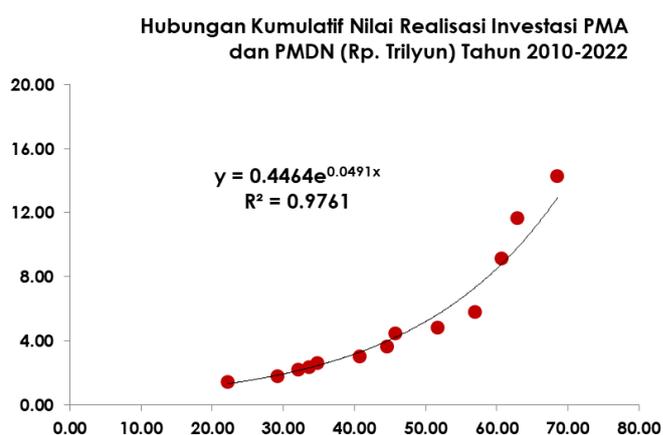
IV.1.1. LPE – Angka Kemiskinan

Plotting data LPE – Jumlah Penduduk Miskin dan LPE - Persentase Penduduk Miskin tahun 2001-2022 (rentang data 23 tahun) menunjukkan pola hubungan yang acak. Hal ini dapat diinterpretasikan dari nilai korelasi R pada hubungan LPE – Jumlah Penduduk Miskin = 13.60% dan nilai korelasi R pada hubungan LPE - Persentase Penduduk Miskin = 11.27%, yang menunjukkan interpretasi hubungan yang lemah (Schober and Boer, 2018), sehingga perlu dicari pola atau rantai hubungan yang lebih baik antara LPE – Angka Kemiskinan.



IV.1.2. Kumulatif Nilai Realisasi Investasi PMA – Nilai Realisasi Investasi PMDN

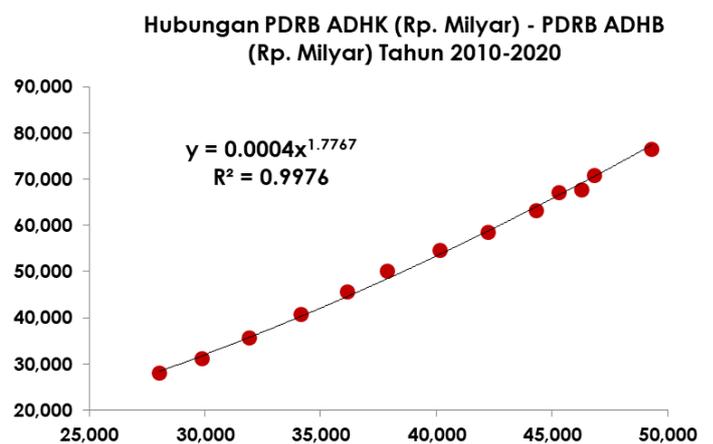
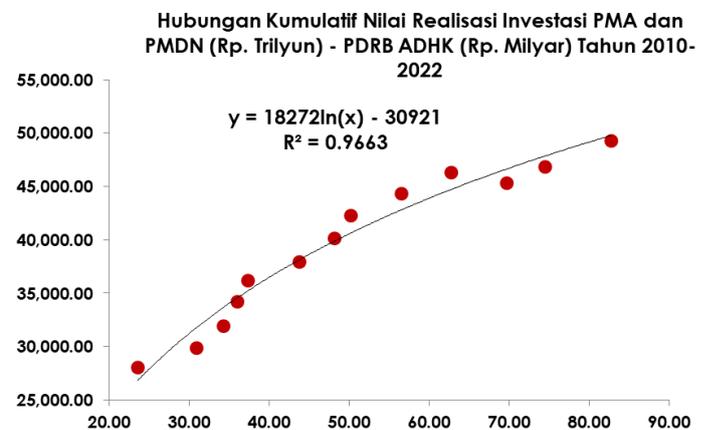
Setelah dilakukan plotting antara Kumulatif Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN, ditemukan pola hubungan eksponensial dengan nilai korelasi =98.80% yang menunjukkan interpretasi hubungan yang sangat kuat (Schober and Boer, 2018). Dasar hubungan ini secara real belum diketahui dengan jelas dan belum dibahas pada saat ini, namun pola hubungan eksponensial yang sangat kuat ini tetap akan dipergunakan di paper ini. Dengan melakukan input besarnya Kumulatif Nilai Realisasi Investasi PMA di suatu saat, akan dapat diketahui Kumulatif Nilai Realisasi Investasi PMDN di saat tersebut. Setelah Kumulatif Nilai Realisasi Investasi PMDN diketahui, kemudian dilakukan



penjumlahan untuk mendapatkan Kumulatif Nilai Realisasi Investasi Total PMA dan PMDN per Tahun yang diinginkan.

IV.1.3. Kumulatif Nilai Realisasi Investasi Total PMA dan PMDN – PDRB ADHK – PDRB ADHB

Plotting antara Kumulatif Nilai Realisasi Investasi Total PMA dan PMDN dengan nilai PDRB ADHK dan PDRB ADHK - PDRB ADHB menunjukkan nilai korelasi yang sangat tinggi (98.30% dan 99.88%) yang menunjukkan interpretasi hubungan yang sangat kuat (Schober and Boer, 2018), dan mengikuti pola hubungan grafik fungsi logaritma natural. Dengan melakukan input Kumulatif Nilai Realisasi Investasi PMA di saat tertentu secara berurutan dengan terlebih dahulu mengikuti pola hubungan antara Kumulatif Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dan berikutnya pola hubungan PDRB ADHK dan PDRB ADHB, akan dapat diketahui nilai PDRB ADHK dan PDRB ADHB pada



saat tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Purwakarta selama 13 tahun terakhir dipengaruhi oleh nilai investasi PMA dan PMDN dengan mengikuti pola logaritma natural.

IV.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan PDRB ADHB Per Kapita

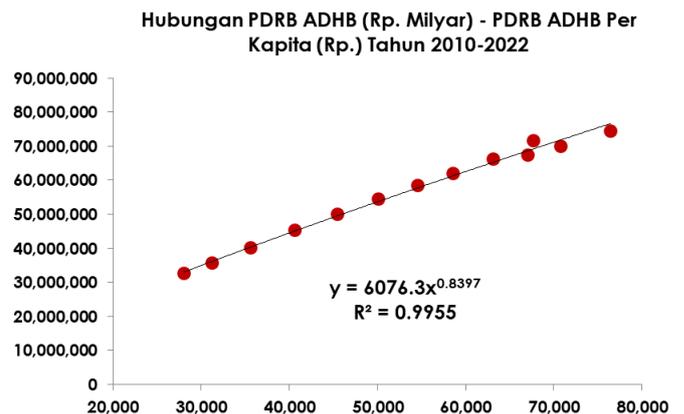
Setelah nilai PDRB ADHK dapat diketahui, kemudian LPE dapat dihitung menggunakan dengan persamaan :

$$LPE = \frac{PDRB\ ADHK_{n+1} - PDRB\ ADHK_n}{PDRB\ ADHK_n} \times 100\% = \left(\frac{PDRB\ ADHK_{n+1}}{PDRB\ ADHK_n} - 1 \right) \times 100\%$$

dengan notasi :

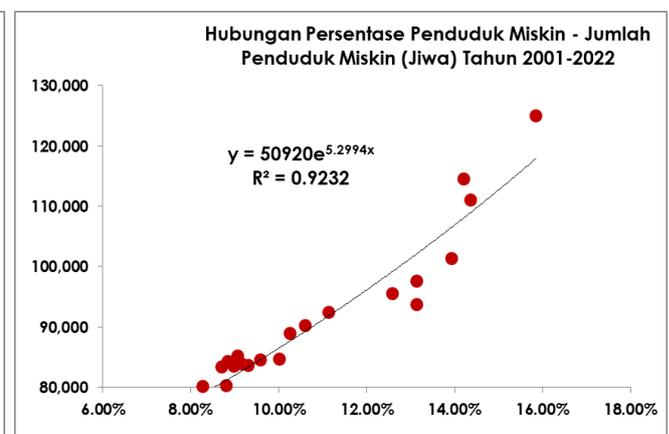
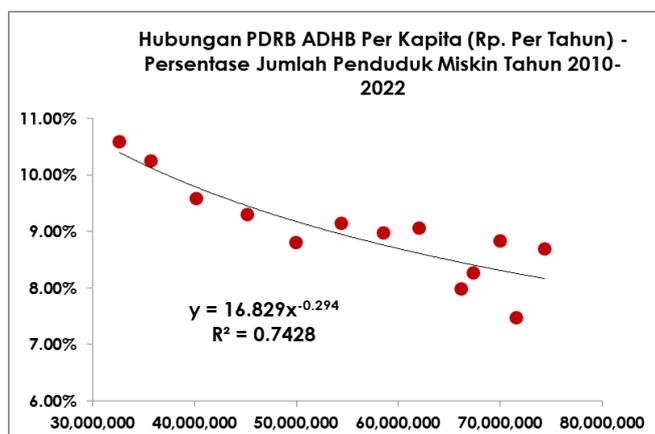
LPE	=	Laju Pertumbuhan Ekonomi
$PDRB\ ADHK_{n+1}$	=	PDRB ADHK tahun ke-n+1
$PDRB\ ADHK_n$	=	PDRB ADHK tahun ke-n

Berdasarkan persamaan di atas, dapat diketahui bahwa peningkatan PDRB ADHK tidak selalu menunjukkan peningkatan LPE, karena PDRB ADHK harus mengalami peningkatan sampai pada level dimana LPE pada saat tersebut lebih besar daripada LPE di saat sebelumnya. Artinya, nilai LPE



sebenarnya menunjukkan tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan PDRB, namun juga percepatan gerak perekonomian, dan perekonomian suatu wilayah tetap bisa bertumbuh namun mengalami perlambatan. Setelah LPE dihitung, dilakukan plotting PDRB ADHB – PDRB ADHB Per Kapita sehingga diperoleh hubungan regresi power dengan nilai korelasi $R = 99.77\%$ yang menunjukkan interpretasi hubungan yang sangat kuat (Schober and Boer, 2018). Nilai korelasi ini menunjukkan bahwa selama 13 tahun terakhir pendapatan per kapita masyarakat di Kabupaten Purwakarta sangat dipengaruhi oleh kekuatan struktur perekonomiannya.

IV.1.5. PDRB ADHB Per Kapita – Persentase Jumlah Penduduk Miskin – Jumlah Penduduk Miskin



Plotting antara nilai PDRB ADHB Per Kapita dengan data Persentase Jumlah Penduduk Miskin menunjukkan nilai korelasi yang sangat tinggi (86.19%) yang menunjukkan interpretasi hubungan yang kuat (Schober and Boer, 2018), dan diperoleh mengikuti pola hubungan grafik fungsi power. Hal ini menunjukkan bahwa 86.19% Persentase Jumlah Penduduk Miskin dipengaruhi oleh pendapatan per kapita masyarakat. Tidak seperti nilai-nilai korelasi yang telah diperoleh pada pembahasan-pembahasan sebelumnya di atas yang bahkan lebih dari 98%, korelasi hubungan antara nilai PDRB ADHB Per Kapita dengan data Persentase Jumlah Penduduk Miskin menunjukkan masih terdapatnya space (ruang) pengaruh sebesar 13.81% dari selain PDRB ADHB Per Kapita, namun dalam

paper ini tetap akan digunakan sebagai input analisis karena termasuk kategori pola hubungan antar keduanya yang kuat menurut Schober and Boer (2018). Selanjutnya dilakukan plotting hubungan antara Persentase Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin. Ini perlu dilakukan karena hasil plotting menunjukkan pola sebaran data yang sedikit acak. Kemungkinan ini terjadi karena pengaruh dari jumlah penduduk yang meningkat dan keacakan pola data jumlah penduduk miskin di setiap tahun.

IV.1.5. Running Model Regresi

Setelah seluruh regresi selesai disusun, dilakukan running model regresi, dengan cara memasukkan input Kumulatif Nilai Realisasi Investasi PMA pada tahun 2023 dan 2024. Fokus pertama adalah mempertahankan LPE konstan sesuai nilai LPE tahun 2022 yaitu pada nilai = 5.24% per tahun. Pada kondisi ini, disyaratkan adanya penambahan nilai investasi PMA masing-masing sebesar Rp. 4.82 trilyun dan Rp. 7.32 trilyun pada tahun 2023 dan 2024, agar di tahun-tahun yang sama terdapat pengurangan Jumlah Penduduk Miskin sebesar 7007 jiwa pada tahun 2023 dan sebesar 685 jiwa pada tahun 2024 (setara dengan Persentase Jumlah Penduduk Miskin sebesar 7.66% pada tahun 2023 dan 7.49% pada tahun 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan input investasi PMA dan PMDN memiliki nilai minimal tertentu untuk mempertahankan nilai LPE pada nilai yang sama seperti tahun sebelumnya, dan dengan mempertahankan LPE yang sama di setiap tahun akan menghasilkan pengurangan percepatan penurunan Jumlah Penduduk Miskin per tahunnya. Artinya, percepatan pengurangan Jumlah Penduduk Miskin secara modelling dapat dicapai dengan cara meningkatkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN hingga tercapai nilai LPE yang semakin besar dari tahun ke tahun. Pada hasil modelling di bawah ini, terlihat bahwa agar pada tahun 2023 tercapai LPE = 6.00% per tahun, Persentase Jumlah Penduduk Miskin = 7.64% dan Jumlah Penduduk Miskin = 76.335 jiwa, disyaratkan terjadi peningkatan nilai investasi PMA dan PMDN masing-masing sebesar Rp. 5.84 trilyun dan Rp. 2.92 trilyun pada tahun tersebut. Masih pada tahun 2023, agar tercapai nilai LPE = 7.00% per tahun, Persentase Jumlah Penduduk Miskin = 7.61% dan Jumlah Penduduk Miskin = 76.208 jiwa, disyaratkan terjadi peningkatan nilai investasi PMA dan PMDN masing-masing sebesar Rp. 7.18 trilyun dan Rp. 3.99 trilyun pada tahun tersebut. Hasil modelling lanjutan, dengan target nilai LPE = 5.71% (tahun 2023) hingga mencapai nilai LPE = 6.82% (tahun 2031) dilanjutkan dengan plotting hubungan nilai LPE – Persentase Jumlah Penduduk Miskin – Jumlah Penduduk Miskin dan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN – Persentase Jumlah Penduduk Miskin – Jumlah Penduduk Miskin tahun 2023 -2031 diperoleh hasil seperti di bawah ini, dengan peningkatan nilai investasi PMA sebesar Rp. 8.00 trilyun dan peningkatan nilai investasi PMDN bervariasi per tahun.

Prediksi

Tahun	No. Data	Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp. Trilyun)	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Trilyun)	Nilai Realisasi Investasi Total PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	PDRB ADHK (Rp. Milyar)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun	PDRB ADHB (Rp. Milyar)	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Per Kapita)	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
2018	17	51.71	4.85	56.56	44,341.67	4.98%	63,116.67	66,200,698	7.99%	75,940
2019	18	56.95	5.84	62.79	46,278.22	4.37%	67,709.51	71,579,980	7.48%	71,860
2020	19	60.64	9.13	69.77	45,293.24	-2.13%	67,051.58	67,349,000	8.27%	80,170
2021	20	62.84	11.66	74.50	46,840.15	3.42%	70,787.50	69,976,000	8.83%	84,270
2022	21	68.54	14.29	82.83	49,292.97	5.24%	76,468.92	74,345,000	8.70%	83,440
2023	22	73.36	16.37	89.73	51,874.58	5.24%	95,305.89	92,173,499	7.66%	76,433
2024	23	80.68	23.45	104.13	54,594.04	5.24%	104,362.86	99,474,617	7.49%	75,748

Prediksi

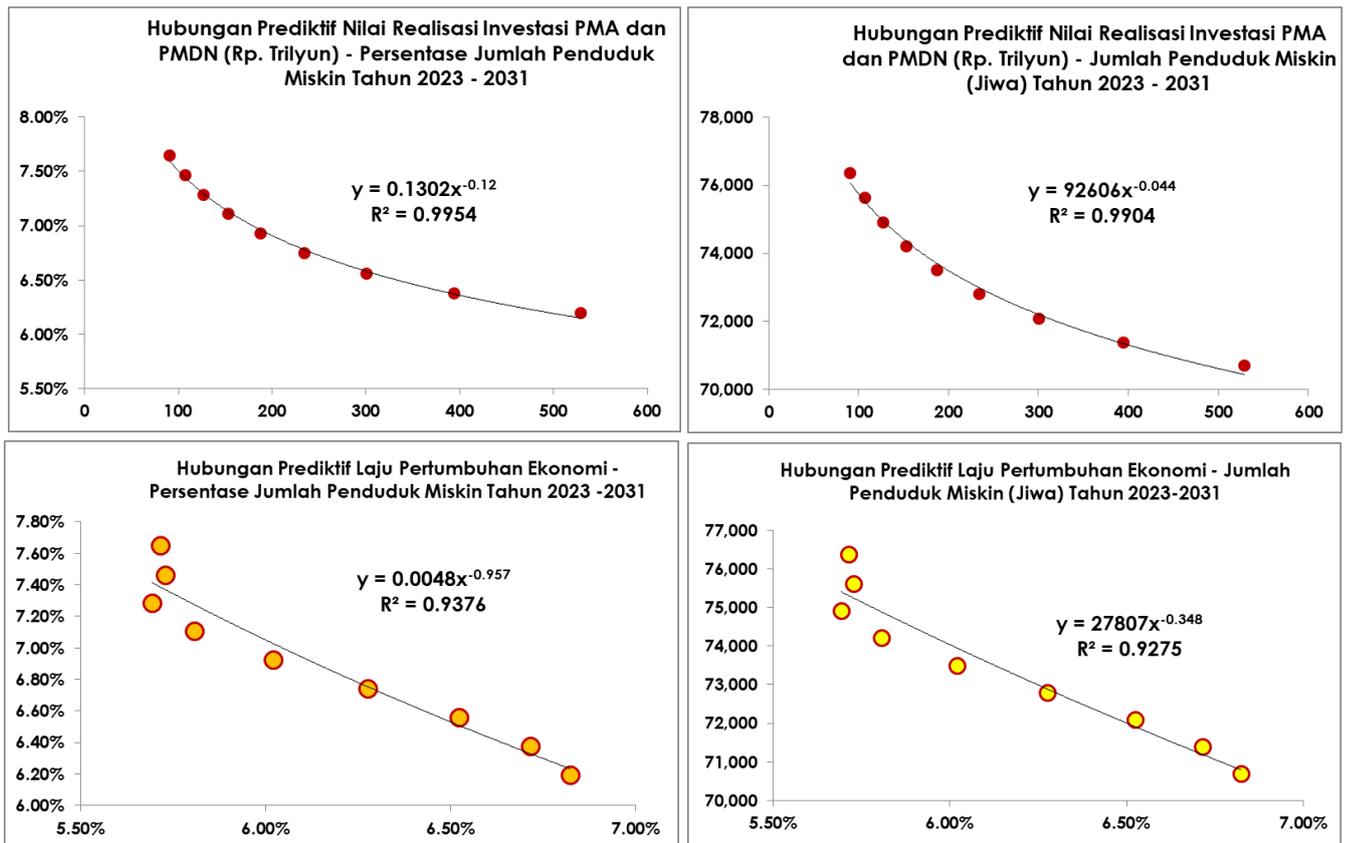
Tahun	No. Data	Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp. Trilyun)	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Trilyun)	Nilai Realisasi Investasi Total PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	PDRB ADHK (Rp. Milyar)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun	PDRB ADHB (Rp. Milyar)	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Per Kapita)	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
2018	17	51.71	4.85	56.56	44,341.67	4.98%	63,116.67	66,200,698	7.99%	75,940
2019	18	56.95	5.84	62.79	46,278.22	4.37%	67,709.51	71,579,980	7.48%	71,860
2020	19	60.64	9.13	69.77	45,293.24	-2.13%	67,051.58	67,349,000	8.27%	80,170
2021	20	62.84	11.66	74.50	46,840.15	3.42%	70,787.50	69,976,000	8.83%	84,270
2022	21	68.54	14.29	82.83	49,292.97	5.24%	76,468.92	74,345,000	8.70%	83,440
2023	22	74.38	17.21	91.59	52,249.60	6.00%	96,533.50	93,169,416	7.64%	76,335
2024	23	82.76	25.97	108.73	55,384.14	6.00%	107,061.39	101,630,000	7.45%	75,559

Prediksi

Tahun	No. Data	Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp. Trilyun)	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Trilyun)	Nilai Realisasi Investasi Total PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	PDRB ADHK (Rp. Milyar)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun	PDRB ADHB (Rp. Milyar)	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Per Kapita)	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
2018	17	51.71	4.85	56.56	44,341.67	4.98%	63,116.67	66,200,698	7.99%	75,940
2019	18	56.95	5.84	62.79	46,278.22	4.37%	67,709.51	71,579,980	7.48%	71,860
2020	19	60.64	9.13	69.77	45,293.24	-2.13%	67,051.58	67,349,000	8.27%	80,170
2021	20	62.84	11.66	74.50	46,840.15	3.42%	70,787.50	69,976,000	8.83%	84,270
2022	21	68.54	14.29	82.83	49,292.97	5.24%	76,468.92	74,345,000	8.70%	83,440
2023	22	75.72	18.38	94.10	52,743.69	7.00%	98,161.29	94,486,867	7.61%	76,208
2024	23	85.49	29.70	115.19	56,437.96	7.00%	110,707.42	104,528,428	7.39%	75,314

Modelling

Tahun	Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp. Trilyun)	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Trilyun)	Nilai Realisasi Investasi Total PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	PDRB ADHK (Rp. Milyar)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun	PDRB ADHB (Rp. Milyar)	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Per Kapita)	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
2018	51.71	4.85	56.56	44,341.67	4.98%	63,116.67	66,200,698	7.99%	75,940
2019	56.95	5.84	62.79	46,278.22	4.37%	67,709.51	71,579,980	7.48%	71,860
2020	60.64	9.13	69.77	45,293.24	-2.13%	67,051.58	67,349,000	8.27%	80,170
2021	62.84	11.66	74.50	46,840.15	3.42%	70,787.50	69,976,000	8.83%	84,270
2022	68.54	14.29	82.83	49,292.97	5.24%	76,468.92	74,345,000	8.70%	83,440
2023	74.00	16.89	90.89	52,109.79	5.71%	96,075.05	92,797,728	7.65%	76,371
2024	82.00	25.02	107.02	55,094.28	5.73%	106,067.88	100,837,486	7.46%	75,628
2025	90.00	37.06	127.06	58,230.20	5.69%	117,030.47	109,519,093	7.29%	74,913
2026	98.00	54.89	152.89	61,611.55	5.81%	129,375.71	119,141,200	7.11%	74,210
2027	106.00	81.29	187.29	65,320.43	6.02%	143,534.92	129,997,939	6.93%	73,505
2028	114.00	120.40	234.40	69,420.22	6.28%	159,929.32	142,356,608	6.74%	72,798
2029	122.00	178.33	300.33	73,948.87	6.52%	178,933.07	156,431,252	6.56%	72,090
2030	130.00	264.13	394.13	78,915.14	6.72%	200,837.48	172,360,583	6.38%	71,389
2031	138.00	391.22	529.22	84,299.96	6.82%	225,827.86	190,198,105	6.19%	70,704



Hasil-hasil di atas menunjukkan 4 hubungan prediktif, dengan tafsiran matematis sebagai berikut ini.

1. Hubungan antara LPE – Persentase Jumlah Penduduk Miskin – Jumlah Penduduk Miskin menunjukkan bahwa peningkatan nilai LPE akan mengurangi Persentase Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin dengan mengikuti kurva fungsi power (masing-masing nilai korelasi = 96.83% dan 96.31%).
2. Kumulatif Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang semakin meningkat akan semakin mengurangi Persentase Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin, juga mengikuti kurva fungsi power (nilai korelasi masing-masing = 99.77% dan 99.52%).
3. Hasil di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN dan LPE di memiliki peran yang sangat kuat dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta.

V. Kesimpulan

- 1) Di Kabupaten Purwakarta, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan dipengaruhi oleh faktor pencetus yaitu besarnya nilai investasi PMA dan PMDN dan faktor perantara yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, dimana nilai investasi PMA dan PMDN mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh $\pm 57\%$ - 58% skala perekonomian dari

sektor industri pengolahan, dan besarnya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi besarnya pendapatan per kapita masyarakat yang mempengaruhi besarnya angka kemiskinan.

- 2) Secara prediktif, dapat dihitung bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6.00% per tahun akan dapat menurunkan Jumlah Penduduk Miskin dari 83.440 jiwa (persentase Jumlah Penduduk Miskin = 8.70%) di tahun 2022 menjadi 74.022 jiwa (persentase Jumlah Penduduk Miskin = 7.09%) di tahun 2023.
- 3) Seluruh hasil analisis di atas menunjukkan bahwa, penyusunan kebijakan strategis untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta seharusnya mengikutsertakan analisis hubungan antara kemiskinan dengan struktur ekonomi, terutama terkait perkembangan aktivitas-aktivitas atau sektor-sektor utama penggerak perekonomian.

VI. Referensi

- Anonim, 2003-2023, Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2003-2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
- Nandori, E.S., 2010, The Effect of Economic Growth On Poverty in Eastern Europe, Zarzadzanie Publiczne, Institute of World and Regional Economics, University Of Miskolc, Hungary
- Purnomo, S.D., Istiqomah, 2019, Economic Growth and Poverty : The Mediating Effect of Employment, Journal of Economic and Policy, Faculty of Economic and Business, The University of Jenderal Soedirman
- Scober and Boer, 2018, Correlation Coefficients : Appropriate Use and Interpretation, Department of Anesthesiology, VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherland
- Suryahadi, A. et al, 2006, Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia : The Effects of Location and Sectoral Components of Growth, SMERU Working Paper – SMERU Research Institute, Indonesia
- Wahyudianto, H.E., 2021, Economic Growth and Poverty in West Kalimantan, Statistic Analysis Forum-June 2021, Central Bureau of Statistics – Subdistrict of Bengkayang, West Kalimantan